

## Pemkot Tangerang Asesmen Ulang Infrastruktur Penunjang PTM

**TANGERANG (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tengah menilai ulang infrastruktur sekolah penunjang pembelajaran tatap muka (PTM) yang bakal digelar di kota itu. Sebagaimana diketahui, skema PTM terbatas telah diizinkan untuk dilaksanakan di Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah berujar, pihaknya telah melakukan penilaian atau asesmen terkait infrastruktur penunjang PTM terbatas untuk jenjang PAUD sampai SMP. Namun, berdasarkan hasil asesmen, infrastruktur penunjang itu belum mendapatkan nilai sempurna. "Kami sudah melakukan asesmen, tapi ternyata ada yang harus lebih disempurnakan," paparnya saat ditemui, Kamis (2/9).

Menurut Arief, setiap sekolah tidak diperkenankan untuk menyalakan air conditioning (AC) di kelas saat melakukan PTM. Kemudian, setiap jendela di kelas juga tidak boleh dipasang gordena. Saat diasesmen, masih ada sejumlah sekolah yang mematuhi aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu,

pihaknya bakal mengasesmen ulang infrastruktur di setiap sekolah. "Maka saya minta pastikan Dinas Pendidikan akan melakukan asesmen ulang sekolah-sekolah," ungkap Arief.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah risiko penularan Covid-19 saat PTM. Dengan demikian, Pemkot Tangerang belum menentukan waktu pelaksanaan PTM. Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang mencatat, baru ada 50.000 pelajar di wilayah itu yang menerima vaksin Covid-19 per 31 Agustus 2021. Padahal, total target vaksinasi pelajar yang tergolong sasaran remaja berusia 12-17 tahun ada 178.803 orang. Dengan demikian, capaian vaksin Covid-19 pelajar remaja baru mencapai sekitar 30 persen.

Karena capaian vaksinasi siswa yang tergolong rendah itu, Dinkes menggelar vaksinasi massal Covid-19 untuk pelajar di Kota Tangerang pada Rabu kemarin dan Kamis ini. Target vaksinasi massal menggunakan Pfizer selama dua hari ini adalah 16.896 pelajar. ● pp

## Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

**TANGSEL (IM)** - Kepala SMKN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Aceng Haruji mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan lahan sekolah itu. Namun dia mengakui pernah diperiksa pihak lembaga antirasuah.

"Saya belum lihat, engga tahu saya. Belum ada si sini, apa belum datang?" kata Aceng saat dikonfirmasi, Kamis (2/9).

Dia juga menegaskan, sekolah tidak pernah digeledah KPK. "Belum (digeledah) KPK. Dulu kalau engga salah tahun 2018 pernah datang cek lokasi. Setelah itu tidak pernah," terangnya.

Namun, Aceng yang menjabat Kepala SMKN 7 Tangsel sejak sekolah itu berdiri pada 2016 mengaku sempat dimintai keterangan oleh KPK terkait pengadaan lahan sekolah itu.

"Saya pernah dimintai

keterangan sama KPK, itu tahun lalu. Kalau engga salah pengada lahan, saya kepala sekolah pertama di sekolah ini," ucap dia

Sebelumnya diberitakan, KPK penggeledah beberapa lokasi di Tangsel, Serang, dan Bogor pada Selasa (31/9). Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Lokasi yang digeledah yakni kediaman dan kantor pihak berkaitan dengan kasus yang baru diusut KPK. "Selama proses penggeledahan tersebut, telah ditemukan dan diamankan berbagai barang yang nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti, di antaranya dokumen, barang elektronik, dan dua unit mobil," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9). ● pp



### SISWA BELAJAR DI LANTAI AKIBAT BANGKU SEKOLAH LAPUK

Sejumlah siswa belajar di lantai tanpa bangku dan meja belajar di SD Negeri Gelam 2 di Kampung Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (2/9). Puluhan bangku dan meja belajar di sekolah tersebut lapuk dan tidak layak pakai sejak tahun 2019 sehingga saat dimulai kembali pembelajaran tatap muka 2 dari 6 ruang kelas di sekolah tersebut tidak dilengkapi bangku dan meja belajar.

### PELAKU RAUP RP13 JUTA DARI HAK WARGA

# DPRD Tangerang Kembali Cium Gelagat Pungli Bansos

Bantuan tersebut digelapkan oleh oknum petugas. Kartu ATM KPM PKH yang seharusnya dipegang oleh yang berhak malah disalahgunakan oleh oknum tersebut.

**TANGERANG (IM)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyoroiti dugaan adanya kasus penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang kembali terjadi di Kota Tangerang.

Setelah di Karang Tengah, kasus ini terjadi lagi di Kelurahan Batusari, Kecamatan Batucapeer.

Dua orang warga Darussalam Utara, Kelurahan Batusari, yakni Sukilah dan Ita Puspitasari. Keduanya yang berstatus ibu rumah tangga ini sebenarnya terdaftar menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) sejak Januari 2018 namun belum pernah mendapatkan haknya hingga kini.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Dedy Fitriadi menerangkan bantuan tersebut digelapkan

oleh oknum petugas. Kartu ATM KPM PKH yang seharusnya dipegang oleh keduanya malah disalahgunakan oleh oknum tersebut.

"Semua bukti terlampir jelas. Kartu ATM dipegang oleh oknum itu kemudian dia ambil," ujarnya, Kamis (2/9).

Ita dan Sukilah pun kemudian diarahkan untuk membuat surat kehilangan atas ATM tersebut untuk mencetak rekening koran di Bank BNI. Ternyata ada transaksi penarikan uang tunai sejak 2018 tersebut namun bukan dilakukan oleh keduanya.

"Dan ternyata ada itu bukti transaksinya. Mereka pura-pura kehilangan ATM dan buku tabungan. Akhirnya bisa, dicetak rekening koran ada transaksi sejak 2018," kata Dedy.

Total transaksinya Rp13 juta lebih. Dengan rincian, Rp6.163.166 hak Sukilah dan

Rp7.542.398 Ita Purnamasari.

Mereka pun kemudian mengadakan kejadian ini ke DPRD Kota Tangerang. Wakil rakyat itu kemudian memanggil pihak terkait soal kasus ini yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, pihak Bank BNI, Kelurahan dan Kecamatan.

"Kita sudah melakukan hearing dua kali seharusnya hari ini dengan pihak Bank BNI tapi batal karena mereka tidak datang," katanya.

Dedy menyangkan pihak Bank BNI lalai dalam memberikan kartu ATM dan buku tabungan bukan pada penerimanya. Seharusnya, kartu tersebut diambil oleh KPM PKM bukan orang lain.

Politisi fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan pada pertemuan pertama pihak Bank BNI menjelaskan kartu tersebut memang sengaja diberikan lantaran sudah diklaim sudah mendapatkan surat kuasa dari Dinsos. Namun saat itu, pihak Bank BNI belum menyerahkan buktinya.

"Hari pertama ada pernyataan dari pihak BNI bahwa buku tabungan dan ATM untuk penerima yang belum dibagikan ada surat masuk dari Dinsos dan itu sudah diserahkan ke Dinsos," ungkap Dedy.

"Waktu itu (Hearing) Bank BNI diwakili oleh pegawainya Bu Dinda, saya minta surat masuk itu dan tanda terima buku tabungan ATM yang belum diterima saya minta tanda terimanya saya berikan 2 Minggu waktu," tambah Dedy.

## Pemkab Lebak Apresiasi Jokowi Komitmen Bangun Sarana Pertanian

**LEBAK (IM)** - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk membangun sarana pertanian guna mendukung swasembada pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah itu.

Kepala Bidang Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Nana Mulyana di Lebak, Kamis (2/9), mengatakan kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun sektor pertanian cukup dirasakan petani di daerah karena setiap tahun menyalurkan bantuan sarana alat pertanian (Alsintan), sarana produksi (Saprodi), termasuk pembangunan infrastruktur jaringan irigasi maupun jalan usaha tani dan percontakan sawah baru.

Kebijakan Jokowi tersebut tentu berdampak terhadap peningkatan produksi pangan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini, kata dia, di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian tidak terdampak karena memproduksi pangan.

Regulasi kebijakan Presiden Jokowi terhadap pertanian dinilai luar biasa, karena setiap tahun produksi pangan di Kabupaten Lebak selalu surplus, bahkan bisa menyumbangkan ketersediaan pangan untuk daerah lain, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang hingga Lampung.

"Kami mendorong usaha pertanian pangan menjadikan andalan ekonomi petani, sehingga produksi dan produktivitas pangan ditingkatkan karena permintaan pasar cukup tinggi," katanya menambahkan.

Ia mengatakan, petani padi sawah di Kabupaten Lebak setiap musim tanam kini pengelolaan pertaniannya menggunakan mesin traktor untuk mempercepat gerakan tanam juga menekan biaya produksi.

Saat ini, kata dia, petani tradisional sudah terkilas yang menggunakan bajak kerbau dan cangkul.

Diperkirakan petani di sini menerapkan teknologi traktor sekitar 90 persen dari 1.200 kelompok tani. Selain itu juga jaringan sarana infrastruktur irigasi relatif baik, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP).

Begitu pula percontakan sawah baru diperluas sehubungan beberapa daerah terkena proyek pembangunan nasional, di antaranya Jalan Tol Serang - Panimbang.

"Kami setiap tahun mendapat bantuan sarana pertanian itu dari Pemerintah Pusat yang didanai APBN," katanya menjelaskan.

Produksi beras Januari sampai Juni 2021, menurut dia, tercatat mengalami surplus sebesar 92.935 ton atau

mencukupi kebutuhan pangan selama tujuh bulan ke depan.

Produksi beras lokal tersebut dari hasil panen sebanyak 166.649 ton dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Lebak 1,3 juta jiwa.

Dari produksi pangan sebanyak 166.649 ton itu maka kebutuhan beras sepanjang 2021 sebanyak 147.428 ton dengan kebutuhan rata-rata per bulan 12.286 ton.

Dengan demikian, kata dia, kebutuhan konsumsi beras dari Januari sampai Juli 2021 sebanyak 73.714 ton.

"Kami minta petani terus melaksanakan gerakan tanam guna memenuhi kebutuhan pangan juga peningkatan ekonomi," jelasnya.

Ia menyebutkan, selama ini usaha pertanian padi sawah masih menjadi andalan ekonomi petani Kabupaten Lebak.

Apabila, produktivitas padi sebanyak enam ton per hektare dengan harga Rp5.000 per kg gabah kering maka petani bisa mendapatkan sekitar Rp30 juta.

Pendapatan sebesar itu maka keuntungan petani bersih Rp20 juta per hektare setelah dipotong biaya produksi pertanian padi sawah yang rata-rata mencapai Rp10 juta per hektare. "Kami berharap produksi pangan terus meningkat dengan kebijakan Bapak Jokowi," ujarnya. ● pra

## 114 Anak di Lebak Kehilangan Orang Tua akibat Covid-19

**LEBAK (IM)** - Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Banten, masih mendata anak-anak kehilangan orang tua yang meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Mereka sudah mencatat 114 anak menjadi yatim piatu akibat wabah ini.

"Kami hingga kini baru merekap sebanyak 114 anak yatim piatu dan dipastikan terus dilakukan pendataan," jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra di Lebak, Kamis (2/9).

Eka mengatakan, pendataan anak yatim piatu tersebut menindaklanjuti surat dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka rencananya akan mendapatkan bantuan. Anak yang masih sekolah mendapatkan Rp300 ribu dan yang belum sekolah memperoleh Rp200 ribu per bulan.

Bantuan diberikan agar para anak yatim piatu ini tetap

bisa melanjutkan pendidikan. Namun, Eka belum bisa memastikan jenis bantuan itu, apakah berupa uang tunai atau bantuan lain seperti sembako. Dinsos Lebak belum menerima arahan dari Kemensos terkait masalah ini.

Menurutnya, Kemensos sangat tepat memberikan bantuan kepada anak yatim piatu yang ditinggalkan orang tuanya akibat wabah Covid-19. Mereka hampir dipastikan kesulitan ekonomi, terlebih bagi yang memang berasal dari keluarga prasejahtera.

Bantuan yatim piatu, harap Eka, tidak hanya untuk anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat Covid-19. Anak yatim piatu lainnya juga harus dibantu.

"Kami berharap jangan sampai kehidupan anak-anak yatim piatu itu terlunta-lunta karena tidak adanya bantuan sosial," ucapnya. ● pra

## DPRD Kota Tangerang Sebut Kinerja ASN Belum Maksimal

**TANGERANG (IM)** - Pengawasan dan kontrol kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tangerang dinilai masih belum maksimal.

Sebab, masih adanya oknum ASN yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.

Anggota DPRD Kota Tangerang, Saeroji menegaskan, pihaknya terus mengawasi Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Namun, dia meminta Pemerintah Kota Tangerang juga fokus melakukan pencegahan. "Kita mengawasi ins-

pektorat sesuai tupoksinya atau tidak. Tapi harus ada upaya preventif. Ini perlu evaluasi pemkot dalam rangka mencegah hal ini," katanya, Kamis (2/9). Saeroji mengakui masih banyak ASN Kota Tangerang tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.

Pasalnya, mereka ditempatkan tidak sesuai dengan minat maupun latar belakangnya.

"Di satu sisi masih banyak yang tidak sesuai tempatnya. Di Dinas Kominfo kita tanya backgroundnya mana, (pendidikan) ekonomi, lah kenapa gak diisi oleh lulusan pendidikan IT," katanya. ● pp



### VAKSINASI COVID-19 PELAJAR BERKEBUTUHAN KHUSUS

Guru pembimbing berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat sementara petugas kesehatan bersiap menyuntikan vaksin Covid-19 kepada pelajar dengan kebutuhan khusus di Sekolah Khusus As Salam, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/9). Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Tangerang Selatan ini bertujuan untuk pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi siswa kebutuhan khusus.



### VAKSINASI BAGI PELAJAR DI LAMPUNG

Seorang pelajar menerima suntikan vaksin Covid-19 saat vaksinasi massal bagi peserta didik di Gedung Serba Guna (GSG) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung, Lampung, Kamis (2/9). Sebanyak 400 orang pelajar SMA Negeri 2 mendapatkan vaksin dosis pertama sebagai upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19.

## Disdik Tangerang Masih Tunggu Izin Gubernur untuk Gelar PTM

**TANGERANG (IM)** - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tangerang, Sefullah mengemukakan sejumlah sekolah di daerah setempat sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, namun masih menunggu izin dari Gubernur Banten.

"Terkait perkembangan PTM, baik disdik maupun satuan pendidikan sudah siap. Dan itu sudah kami sampaikan ke satuan tugas Provinsi Banten," kata Saefulah.

Ia menjelaskan sejauh ini satuan pendidikan di Kabupaten Tangerang sudah menyatakan kesiapannya dalam mengawali PTM, baik secara teknis sarana dan prasarana yang memenuhi protokol kesehatan di lingkungan sekolah, termasuk menggunakan sistem pembelajaran campuran di tengah pandemi Covid-19.

"Jadi kami tinggal menunggu dan mengikuti arahan dari Gubernur Banten karena Bupati Tangerang juga pasti menunggu instruksi

langsung," katanya.

Kemudian, ia menambahkan sampai saat ini vaksinasi terhadap tenaga pendidikan di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 80 persen, sedangkan untuk pelajar baru mencapai 24 persen.

Akan tetapi, dari capaian tersebut jika merujuk pada Permendikbud SKB 4 Menteri bahwa jika tenaga pendidik itu sudah ter vaksin semua, maka pelaksanaan PTM dapat dilakukan.

"Karena kalau sekarang menargetkan vaksinasi pelajar, sekolah dasar itu lebih besar atau banyak. Makanya kami hanya berpatokan pada tenaga pendidik," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Disdik Kabupaten Tangerang tidak akan mengabaikan vaksinasi terhadap pelajar usia 12-17 tahun itu. Bahkan, pihaknya akan terus mempercepat proses pemberian vaksin Covid-19 dengan berkoordinasi bersama dinas kesehatan setempat untuk dapat mencapai target yang ditentukan.

"Insy Allah vaksin pelajar kita akan terus berjalan sampai mencapai target," kata dia. ● pp